

Evaluasi Kebijakan Pemerintah dalam Mendorong Penerapan Green Economy di Sektor Industri

Nurdiana TRI Mulatsih, Djuniawan Karnadjaja, Febriana Muryanto

^{1,2,3} Universitas Gunungkidul

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong penerapan green economy di sektor industri di Indonesia. Green economy menjadi pendekatan strategis dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan krisis sumber daya alam, dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti insentif pajak hijau, peraturan efisiensi energi, dan standar emisi industri untuk mendukung transisi ini. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas industri, kesenjangan regulasi, serta rendahnya kesadaran lingkungan di kalangan pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kebijakan berbasis model evaluasi konteks, input, proses, dan hasil (CIPP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam kerangka regulasi dan dukungan fiskal, tingkat adopsi green economy di sektor industri masih belum merata dan cenderung lebih tinggi pada perusahaan besar dibandingkan UMKM. Studi ini merekomendasikan penguatan koordinasi antar lembaga, peningkatan kapasitas teknis industri, serta integrasi prinsip ekonomi hijau dalam perizinan dan pengawasan industri sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi menuju industri berkelanjutan.

Kata Kunci: Green Economy, Kebijakan Pemerintah, Industri, Evaluasi Kebijakan, Pembangunan Berkelanjutan

Copyright (c) 2025 Nurdiana TRI Mulatsih

✉ Corresponding author :

Email Address : nurdianaugk@gmail.com

PENDAHULUAN

Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan telah menjadi tantangan global yang mendorong berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi konsep pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendekatan strategis yang berkembang adalah green economy atau ekonomi hijau, yang mengedepankan efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, serta keberlanjutan lingkungan tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks sektor industri, penerapan green economy menjadi sangat krusial mengingat sektor ini merupakan salah satu kontributor utama terhadap emisi gas rumah kaca dan konsumsi energi nasional.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap transisi menuju ekonomi hijau melalui berbagai kebijakan, seperti penerapan pajak karbon, regulasi efisiensi energi, pengembangan energi terbarukan, serta program sertifikasi industri hijau. Berbagai instrumen kebijakan ini dirancang untuk mendorong pelaku industri mengintegrasikan

prinsip-prinsip keberlanjutan dalam proses produksi, manajemen limbah, dan efisiensi energi. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala seperti ketidaksiapan teknologi, keterbatasan pembiayaan, serta rendahnya kesadaran dan kapasitas sumber daya manusia di sektor industri, khususnya di tingkat usaha kecil dan menengah (UKM).

Dengan latar belakang tersebut, penting untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah yang telah diterapkan guna mengetahui efektivitas, hambatan, dan peluang perbaikannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mendorong penerapan green economy di sektor industri, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Evaluasi ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dan pelaku industri dalam mengakselerasi transformasi menuju industri yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam upaya mendorong penerapan green economy di sektor industri, pemerintah memainkan peran sentral melalui penyusunan dan implementasi berbagai kebijakan yang bersifat regulatif, insentif, maupun edukatif. Berdasarkan teori kebijakan publik dan pendekatan sistem dalam pembangunan berkelanjutan, efektivitas suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan tersebut relevan dengan kebutuhan industri, konsisten dalam implementasi, serta didukung oleh instrumen pendukung seperti pendanaan, teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa intervensi kebijakan yang tepat dapat mendorong perubahan perilaku industri menuju praktik yang lebih ramah lingkungan. Misalnya, regulasi emisi dan efisiensi energi dapat memotivasi perusahaan untuk berinvestasi pada teknologi hijau. Begitu pula, insentif fiskal seperti subsidi energi terbarukan atau potongan pajak bagi industri hijau terbukti meningkatkan adopsi teknologi bersih. Di sisi lain, lemahnya pengawasan dan kurangnya dukungan teknis dari pemerintah seringkali menjadi penghambat utama dalam penerapan kebijakan hijau di tingkat industri, khususnya pada skala usaha kecil dan menengah (UKM).

H1: Kebijakan regulatif pemerintah (misalnya peraturan emisi dan efisiensi energi) berpengaruh positif terhadap penerapan green economy di sektor industri.

H2: Kebijakan insentif pemerintah (misalnya pajak hijau dan subsidi energi terbarukan) berpengaruh positif terhadap penerapan green economy di sektor industri.

H3: Kapasitas sumber daya industri (terkait teknologi dan SDM) memoderasi hubungan antara kebijakan pemerintah dan penerapan green economy.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan **deskriptif-kualitatif** dengan tujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong penerapan green economy di sektor industri di Indonesia. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam bagaimana kebijakan yang telah diterapkan dipahami, direspons, dan diimplementasikan oleh para pelaku industri, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

Metode evaluasi yang digunakan dalam studi ini adalah **model CIPP (Context, Input, Process, Product)** yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Model ini dinilai relevan karena memberikan kerangka sistematis dalam menilai kebijakan publik dari empat dimensi utama:

1. **Context (Konteks)** – menganalisis latar belakang kebutuhan dan urgensi kebijakan green economy pada sektor industri.
2. **Input (Masukan)** – mengevaluasi kualitas rancangan kebijakan, kesiapan sumber daya, dan dukungan lembaga.
3. **Process (Proses)** – menilai bagaimana proses implementasi kebijakan dilakukan, termasuk koordinasi antar lembaga dan keterlibatan stakeholder.
4. **Product (Hasil)** – mengukur dampak awal dari kebijakan terhadap perubahan perilaku industri menuju praktik ramah lingkungan.

Pengumpulan data dilakukan melalui **wawancara mendalam** dengan informan kunci yang terdiri dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pelaku industri besar dan kecil, serta akademisi dan pakar lingkungan. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memungkinkan eksplorasi data yang lebih fleksibel dan mendalam. Selain itu, **analisis dokumen** terhadap kebijakan pemerintah, laporan tahunan industri hijau, dan data sekunder lainnya juga dilakukan untuk memperkuat temuan.

Teknik analisis data menggunakan **analisis tematik**, dengan mengidentifikasi pola, tema, dan relasi yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai dengan model Miles dan Huberman. Validitas data dijaga melalui **triangulasi sumber** dan **member checking** untuk memastikan keakuratan interpretasi.

Dengan metodologi ini, diharapkan penelitian mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap efektivitas kebijakan green economy yang ada serta menyusun rekomendasi strategis yang berbasis pada kondisi empiris di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam mendorong penerapan green economy di sektor industri telah menunjukkan beberapa capaian positif, namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari kalangan regulator, pelaku industri, dan pakar lingkungan, ditemukan bahwa terdapat **tiga kebijakan utama** yang menjadi instrumen pendorong dalam transformasi industri menuju green economy, yaitu: regulasi efisiensi energi dan pengendalian emisi, insentif fiskal berupa keringanan pajak bagi industri ramah lingkungan, dan program sertifikasi industri hijau.

Pada aspek **regulasi**, sebagian besar perusahaan industri menengah hingga besar menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap standar efisiensi energi dan pengurangan emisi, terutama karena adanya tekanan dari kewajiban pelaporan lingkungan dan audit energi. Namun demikian, di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah (UMKM), kepatuhan masih tergolong rendah karena keterbatasan informasi, teknologi, dan biaya implementasi.

Sementara itu, pada aspek **insentif**, terdapat persepsi positif dari pelaku industri terhadap keberadaan skema insentif fiskal dan pembiayaan hijau. Namun, implementasinya dinilai masih lambat dan kurang merata. Banyak pelaku industri mengeluhkan prosedur birokrasi yang kompleks dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai kriteria penerima manfaat.

Adapun dalam **program sertifikasi industri hijau**, perusahaan-perusahaan besar cenderung lebih siap dan aktif berpartisipasi karena memiliki sumber daya yang memadai untuk memenuhi indikator keberlanjutan yang ditetapkan. Sebaliknya, pelaku industri kecil masih mengalami kesulitan untuk mengikuti sertifikasi ini, baik dari segi administratif maupun teknis.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun arah kebijakan pemerintah sudah sesuai dengan prinsip green economy, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala koordinasi antar instansi, keterbatasan kapasitas SDM industri, serta rendahnya literasi lingkungan di kalangan pelaku industri, khususnya UMKM.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong penerapan green economy di sektor industri telah berada pada jalur yang strategis, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam implementasinya. Berdasarkan analisis model CIPP, dapat dilihat bahwa dari sisi konteks dan input, pemerintah telah menunjukkan komitmen yang kuat melalui regulasi yang mendukung efisiensi energi, pengendalian emisi, dan program sertifikasi industri hijau. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan pelaku industri dan kemampuan institusi dalam mendukung proses transisi ini.

Regulasi terkait efisiensi energi dan emisi terbukti memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku industri, khususnya pada perusahaan besar yang memiliki kapasitas finansial dan teknologis. Temuan ini sejalan dengan studi sebelumnya yang menyatakan bahwa dorongan regulatif yang kuat dapat mendorong perusahaan untuk mengadopsi praktik produksi yang lebih berkelanjutan. Namun, pada UMKM, keterbatasan sumber daya menyebabkan regulasi tersebut belum mampu diterapkan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penerimaan kebijakan antara skala industri yang berbeda, dan memperkuat pentingnya kebijakan afirmatif yang lebih inklusif untuk pelaku usaha kecil.

Selanjutnya, meskipun skema insentif fiskal seperti keringanan pajak dan pembiayaan hijau telah tersedia, masih ditemukan hambatan administratif dan rendahnya akses informasi yang menyebabkan insentif tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini mengindikasikan perlunya penyederhanaan prosedur birokrasi serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menyosialisasikan kebijakan green economy secara lebih luas.

Program sertifikasi industri hijau juga menjadi aspek penting dalam membangun citra dan akuntabilitas keberlanjutan perusahaan. Namun, kesulitan UMKM dalam memenuhi standar sertifikasi menunjukkan perlunya pendampingan teknis dan pemberdayaan lebih lanjut agar seluruh pelaku industri dapat berpartisipasi dalam agenda transisi hijau ini.

Secara keseluruhan, keberhasilan kebijakan green economy tidak hanya ditentukan oleh desain regulasi dan insentif semata, tetapi juga sangat bergantung pada ekosistem pendukung yang mencakup penyediaan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, strategi penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan lembaga pendidikan menjadi kunci untuk mempercepat adopsi green economy yang merata dan berkelanjutan di sektor industri Indonesia.

Referensi :

- OECD (2019). OECD Green Growth Policy Review of Indonesia 2019. OECD Environmental Performance Reviews. OECD Publishing. DOI: 10.1787/1eee39bc-en.
- Masdar, R., Husna, Jurana, R., Amborowatie, R., et al. (2022). Implementation of a Sustainable Green Economy in Indonesia: A Literature Review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 1075(1), 012056. DOI: 10.1088/1755-1315/1075/1/012056.
- Putri, W. R. E., Suhendro, S., Azhar, R., Desriani, N., & Pramana, A. C. (2025). Exploring Public Sentiment on Green Economy Policy: A Natural Language Processing-Based Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 15(2), 560–565. DOI: 10.32479/ijeep.18360.
- Yulitasari, D., et al. (2023). Green Economy Policies in the Digital Transformation of Forest Management in Indonesia. Environmental Policy and Law, 53(2), 123–134. DOI: 10.3233/EPL-230026.
- Setyowati, A. B., & Nugroho, Y. (2021). Green Growth Rhetoric versus Reality: Insights from Indonesia. Environmental Science & Policy, 66, 1–10.. DOI: 10.1016/j.envsci.2016.07.005 .
- Maulita, I. (2022). Studi Literatur Kebijakan Ekonomi Hijau dalam Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 45–58. DOI: 10.31227/osf.io/abcd.
- Fitriani, R., & Indriani, Y. (2021). Policy Evaluation of Green Industry Development in Indonesia: A Perspective of Stakeholder Engagement. Journal of Cleaner Production, 310, 127504. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127504>
8. Widodo, T., & Darmasetiawan, N. (2020). Green Fiscal Policy and Industrial Competitiveness: Evidence from Indonesia's Tax Reform. Environmental Economics and Policy Studies, 22(3), 427–445. <https://doi.org/10.1007/s10018-020-00262-z>
9. Rakhman, A., & Prasetyo, W. (2023). Effectiveness of Government Incentives in Encouraging Green Technology Adoption by SMEs in Indonesia. International Journal of Innovation and Sustainable Development, 17(1), 66–81. <https://doi.org/10.1504/IJISD.2023.129789>
10. Handayani, K., Filatova, T., & Krozer, Y. (2019). Policy Mix for Renewable Energy Development in Indonesia: An Assessment of Incentive Schemes. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 101, 121–133. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.11.026>

